



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI SATYA MASTUTI WIDI
2. Jabatan : KETUA PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU DAN INDUSTRI
PETERNAKAN
3. NHK : 962383

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.330.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/180 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
2. Tanah Seluas 11.000 m2 di KAB / KOTA TANAH LAUT, WARISAN Rp. 230.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 256.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH GR SPORTIVO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 331.800.731

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.917.800.731

III. HUTANG Rp. 243.817.991

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

1.673.982.740

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.